

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.¹ Transfer kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakil Presiden B.J.Habibie telah membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik Indonesia. di tingkat makro, perubahan itu terlihat dari adanya transformasi sistem politik Indonesia dari yang sebelumnya bercorak otoriter ke arah yang lebih demokratis.²

Pemerintah yang sebelumnya sentralistik diubah menjadi desentralistik dalam artian pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerahnya masing-masing untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Selain perubahan atas sistem politik di tingkat makro, reformasi juga menyakut dua perubahan penting lainnya, yakni

¹A. Ubaedillah dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta, PrenadaMedia Grup, 2013) 18.

²Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012). 1.

asas islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Namun setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai lengsernya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, Partai Persatuan Pembangunan kembali menggunakan asas islam dan lambang kabah.

Dalam sebuah partai politik, tidak dapat ditutup kemungkinan adanya sebuah konflik dalam tubuh partai, baik itu konflik internal maupun konflik eksternal. Konflik internal yang kerap menimpa partai politik di Indonesia selalu berujung pada perpecahan para elitnya. Sejumlah elite parpol seringkali menempatkan kekuasaan sebagai tujuan utama dalam berpolitik dan menjadikan parpol sebagai kendaraan untuk mengejar kekuasaan. Konflik internal juga terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan terjadi pada tahun 2014 lalu tersebut memicu adanya dualisme kepemimpinan, yang dimana hasil muktamar Surabaya dengan ketua umum M. Romahurmuziy dan kepemimpinan hasil muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz.

Perpecahan Partai Persatuan Pembangunan diawali dengan dukungan Ketua umum Suryadharma Ali kepada kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dirasa keputusan sepihak oleh beberapa elite PPP. Keputusan Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye terbuka Prabowo dinilai 27 Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW) PPP melanggar kesepakatan partai dalam Mukernas II PPP dan mendesak agar pengurus PPP menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma Ali.⁶

Dualisme yang terdapat pada partai politik tentunya berpengaruh dalam menentukan bakal calon yang akan diusung dalam Pemilihan Umum, baik itu pemilihan kepala daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) atau pada pemilihan calon legislatif, karena adanya dualisme kepengurusan dalam partai bisa menimbulkan pandangan berbeda antara kubu A dan kubu B. Di jelaskan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu bakal calon yang boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Artinya bakal calon yang sama tidak boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik lainnya. Jadi partai politik yang memiliki dualisme kepengurusan harus satu pandangan dalam menentukan calon.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Mojokerto 2015 diwarnai oleh peristiwa politik yang dimana salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati yaitu Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi menuding adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Pasangan calon bupati/wakil bupati yaitu Choirun Nisa-Arifudinsyah. Menurut pasangan calon bupati/wakil bupati Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi KPU melakukan kesalahan terkait diloloskannya Pasangan calon bupati/wakil bupati Choirun Nisa-Arifudinsyah dalam bursa pemilihan bupati/wakil

⁶MetroTV.Com, *Awal Perseteruan "Panas" PPP*, <http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/13/290975/awal-perseteruan-panas-ppp> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 14.10)

Arifudinsyah sejak awal tahap penyerahan syarat dukungan sampai perbaikan berkas pencalonan ke KPU sudah melalui prosedur.⁸

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh tim sukses dari pasangan calon Choirun Nisa-Arifudinsyah menunjukkan bahwa tidak ada masalah dari surat rekomendasi partai politik yang mengusung mereka di cabup/cawabup Mojokerto 2015, terutama surat rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan. Hal tersebut juga diperjelas saat pasangan calon Choirun Nisa-Arifudinsyah saat mendaftarkan diri ke KPU Mojokerto pada tanggal 28 Juli 2015 yang dimana pasangan calon ini membawa SK Rekomendasi dari DPP Romahurmuziy serta DPP PPP Djan Faridz. Aturan tersebut sesuai dengan ketentuan KPU untuk partai politik yang memiliki dualisme kepemimpinan.⁹

Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto memberikan penjelasan bahwasanya sejak awal penetapan calon yang akan mereka usung untuk bertarung di pemilihan kepala daerah Mojokerto 2015 adalah pasangan calon Choirun Nisa-Arifudinsyah. Setelah penetapan calon yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto menyerahkannya ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu oleh DPW PPP mengajukan calon tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

⁸Tempo.com, *PPP terbitkan dua rekomendasi di pilkada Mojokerto, ada apa?*, <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/19/058693363/ppp-terbitkan-dua-rekomendasi-di-pilkada-mojokerto-ada-apa> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016, 16.20)

⁹ Antarajatim.com, *PPP Dukung Pasangan Nisa-Syah Dapatkan Keadilan*, (diakses pada tanggal 22 November 2016, 07.03)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang dinamika politik suatu partai dalam pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini adalah gerak atau kekuatan suatu partai politik saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah dan juga dapat membantu memberikan pemahaman tentang fenomena kehidupan politik yang terjadi di masyarakat, khususnya terhadap partai politik.

Kegunaan Praktis :

Sebagai masukan dan evaluasi bagi mahasiswa politik islam, atas hal-hal yang mengenai pergerakan atau kekuatan suatu partai politik saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah . Juga memberikan masukan kepada seluruh anggota partai dalam menyikapi hal-hal yang akan terjadi saat berlangsungnya pada pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian “Dinamika Politik DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto Dalam pemilihan Bupati Mojokerto 2015” sebagai mahasiswa politik islam, semoga bisa memberikan wawasan agar nanti bisa memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau bisa disebut penelitian terdahulu, memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama

ditunjuk. Selain itu pertimbangan lain juga didasarkan pada kemauan masyarakat dan kecakapan calon yang bersangkutan.

Yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada apa yang akan dikaji yaitu penelitian diatas mengkaji tentang bagaimana proses dalam menentukan penempatan calon bupati yang akan diusung di kabupaten Bone oleh partai Golkar, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang dinamika politik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto pada Pemilihan Bupati Mojokerto 2015,

2. Skripsi *Dinamika Politik Partai Golkar (Studi Kasus DPD Partai Golkar di Kota Salatiga pada Pilkada tahun 2011) ditulis oleh Yonatan Uumbu Tara* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2012 ini, dalam hasil penelitiannya di peroleh hasil bahwasanya Dinamika Partai Partai Golkar di Salatiga pada Pilkada tahun 2011 sarat dengan konflik internal partai. Kemudian dari konflik tersebut menimbulkan beberapa hal yang merugikan Partai Golkar sendiri.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah apa yang dikaji yaitu bahwa penelitian di atas membahas tentang dinamika politik Partai Golkar saat Pilkada 2011 di Kota Salatiga sedangkan penelitian ini membahas dinamika politik Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Bupati Mojokerto 2015.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tian Fitriara Huda jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tahun 2012

yang berjudul *Dinamika Persatuan Pembangunan pada Masa Orde Baru*, yang dimana hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa PPP lahir dan berkembang dengan pesat dan mencapai titik puncak kekuatan pada awal berdirinya. Dinamika menampakkan adanya perubahan susunan pengurus PPP yang sesungguhnya karena keterpaksaan, namun dengan ketangguhannya PPP mampu berdiri dan bangkit kembali meskipun jauh. Perkembangan PPP menjadi lebih kuat ketika berjalan selaras dengan tiap unsurnya, hal ini menunjukkan betapa tangguhannya PPP dan menunjukkan keeksisannya dalam dunia politik di Indonesia.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah apa yang dikaji yaitu bahwa penelitian di atas terfokus membahas tentang dinamika Partai Persatuan Pembangunan pada masa Orde Baru, sedangkan penelitian ini membahas tentang dinamika politik Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan bupati mojokerto 2015.

4. Dalam Jurnal Vol 2, No 5 tahun 2008 yang berjudul *Dinamika Partai Politik di Sumatera Selatan* yang ditulis ole Alfitri, dimana hasil dari yang dikaji oleh penulis memperlihatkan bahwa di Sumatera Selatan partai politik besar dan kecil berebut pengaruh dalam upaya memenangkan pertarungan pilkada di setiap kabupaten/kota maupun provinsi. Hal tersebut dapat dilihat dari persaingan dua partai besar yaitu Golkar dan PDIP yang bertarung ketat memperebutkan kuris kekuasaan pemerintahan di tingkat lokal sebagai bentuk dinamika partai politik di daerah. Dalam pemilu legislative faktor figure calon legislative akan

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literature-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

1. Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti mengambil tempat dan lokasi di kota Mojokerto khususnya di DPC Partai Persatuan Bangsa kabupaten Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi adalah kota Mojokerto adalah salah satu kota/kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati pada saat itu juga adanya berita tentang perebutan surat rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan oleh dua pasangan calon bupati/wakil bupati disana. Dari fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika tentang hal tersebut kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto. Ditambah banyaknya kabar yang beredar bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan surat rekomendasi ganda kepada dua pasangan calon bupati/wakil bupati mojokerto 2015 kemarin. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk meneliti di DPC Partai Persatuan Pembangunan kabupaten mojokerto.

2. Teknik Pengumpulan Data

menjadi informan narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto, Pengurus DPC PPP Kabupaten Mojokerto dan Elite Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu proses penentuan informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang memiliki kebenaran dan pengetahuan yang mendalam.

Adapun kriteria-kriteria penentuan informan narasumber yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Dinamika Politik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto pada Pemilihan Bupati Mojokerto 2015, yaitu :

- a. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto
- b. Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto
- c. Elite/Tokoh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal. Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

